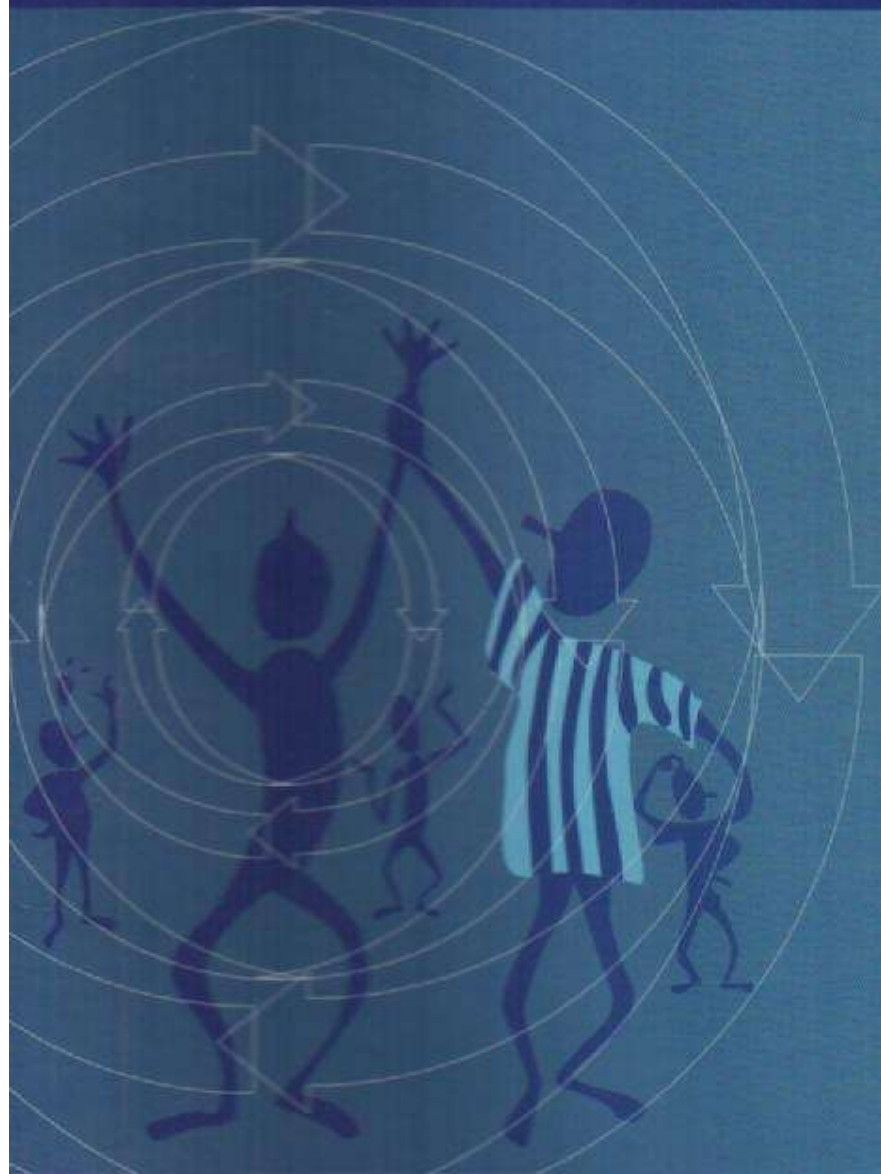


Volume 5, No. 3, September 2006

ISSN-1412-6133

JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pemberdayaan Komunitas



PK (JKS)

Vol. 5

No. 3

Hal. 232-349

Medan, September 2006

ISSN 1412-6133

DITERBITKAN OLEH:
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL **Pemberdayaan KomunitaS**

Terbit tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei, dan September.
Diterbitkan oleh Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara
ISSN 1412-6133

Ketua Penyunting

Matias Siagian

Wakil Ketua Penyunting

Sudirman

Penyunting Pelaksana

M. Arif Nasution

Nurwida Nuru

Agus Suriadi

Edward

Bengkel Ginting

Sismudjito

Tuti Atika

Hairani Siregar

Risnawati Sinulingga

Mastauli Siregar

Penelaah (Mitra Bestari)

Paulus Tangdilintin (UI Jakarta)

Hayaruddin Siagian (LIPI Jakarta)

Makmur Sunusi (Depsos-UI Jakarta)

Janianton Damanik (UGM Yogyakarta)

Adi Fahrudin (STKS Bandung)

Pelaksana Tata Usaha

Syafnita Hanura Silalahi

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:

Jln. Dr. Sofyan No. 1 Kampus USU Medan, 20155

Telepon (061) 8211965, Fax (061) 8211633

Pemberdayaan KomunitaS adalah Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk melakukan kajian kritis terhadap masalah-masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat, didasarkan atas kajian empirik, teoritis, dengan multi perspektif.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 10-22 halaman sebanyak 3 eksemplar (lebih lengkap silahkan dibaca petunjuk pada sampul dalam belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh Dewan Penyunting dan Penelaah. Penyunting dapat melakukan perubahan pada naskah yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

DAFTAR ISI

<i>Vivi Tresnawati & Hayaruddin Siagian</i>	Program Pertanian Polikultur dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa.....	232 – 248
<i>Aprilyani & Agus Suriadi</i>	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN).....	249 – 270
<i>Dewi Hartika Nasution</i>	Adaptasi Masyarakat Miskin terhadap Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM.....	271 – 286
<i>Almaidafiani & Sudirman</i>	Pengaruh Program Penyuluhan Pertanian Organik terhadap Sosial Ekonomi Petani.....	287 – 303
<i>Edward & Husni Thamrin</i>	Peranan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	304 – 323
<i>Sichmen Pandiangan</i>	Bentuk-Bentuk Perlawanan Petani terhadap Dominasi Negara.....	324 – 336
<i>Matias Siagian</i>	Kemiskinan dan Kebijakan Setengah Hati Negara dalam Mengatasinya.....	337 – 340
<i>Sukarman Purba</i>	Menuju Perguruan Tinggi Masa Depan.....	341 – 347

PK (JKS)	Vol. 5	No. 3	Hal. 232 – 347	Medan, September 2006	ISSN 1412-6133
----------	--------	-------	----------------	-----------------------	----------------

MENUJU PERGURUAN TINGGI MASA DEPAN

Sukarman Purba

Abstract

The future strike for quality, so the university as a runner institution high education service must has academic capability to product graduate who has academic capability and profession in his field. To reach it, the future university mast to do anything new and carry out modern and proffesional management. The university must has capability to manage and empower all of it's resourcess who has quality oriented, upgrading it's capability and always focus to customer (people as the sourcess student). The university must implement production oriented management, market oriented, and society oriented. Especially to carry out the Law Institution University, as a good institution to get autonomy in financial management, educational activity, research activity, and service to the people and carry out social mission as a institution which organizer high education for the people. So the university leaders and all of his officials must always already changes his working culture.

Keywords: university, educational management

Pendahuluan

Perguruan Tinggi (PT) sebagai suatu wadah formal yang diharapkan dapat menghasilkan kader-kader calon pemimpin bangsa, haruslah melakukan reformasi manajemen pendidikan dengan mengedepankan peningkatan mutu pendidikan. Perguruan Tinggi yang bermutu haruslah selalu berupaya memenuhi keinginan

atau kebutuhan pelanggannya, yang meliputi mahasiswa, orangtua mahasiswa, staf perguruan tinggi, masyarakat dan pemerintah. Namun, salah satu masalah pendidikan tinggi yang dihadapi dewasa ini adalah merosotnya mutu pendidikan. Seperti dikemukakan Tilaar (2003) bahwa Pendidikan Tinggi perlu mengadakan pembenahan manajemen, karena manajemen yang sentralistik telah mengakibatkan merosotnya mutu pendidikan. Lebih lanjut, Arief Rahman (2004) menyatakan permasalahan pendidikan tinggi saat ini adalah kemampuan menguasai pengetahuan tidak disertai dengan pembinaan kegemaran belajar, titel dan gelar yang menjadi target pendidikan tidak disertai dengan tanggung jawab ilmiah

yang mumpuni serta manajemen pendidikan yang sentralistik. Sedangkan Efendi (2001) menyatakan pendidikan tinggi kita saat ini sedang menghadapi tiga tantangan berat, yakni (a) peningkatan mutu, (b) akses yang merata dan adil bagi semua golongan masyarakat, serta (c) efisiensi internal yang masih rendah. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu a) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen; b) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga Sekolah maupun Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi atau tempat dan c) peran serta masyarakat, khususnya peran orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim (Purba, 2005:3). Kondisi krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak 1997 mengakibatkan subsidi (bantuan) biaya

Sukarman Purba adalah Staf Pengajar Universitas Negeri Medan

pendidikan yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan tinggi sangat kecil sehingga Perguruan Tinggi tidak dapat berbuat banyak dalam peningkatan mutu pendidikan. Anggaran biaya pendidikan yang telah disepakati 20% hanya terealisasi sekitar 9,5% dari APBN.

Rendahnya biaya pendidikan yang dialokasikan mengakibatkan Perguruan Tinggi besar melakukan terobosan dengan melakukan perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN). Dengan keluarnya PP No. 61 Tahun 1999 telah memberi kesempatan kepada empat perguruan tinggi yang telah dianggap memenuhi kriteria melakukan transformasi PTN menjadi PT-BHMN, yaitu UI, UGM, ITB dan IPB, dan beberapa PT lainnya menyusul seperti USU dan UPI. Perubahan ini merupakan momen untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem kelembagaan guna menciptakan agility pada sistem organisasi sehingga mampu berperan secara nyata dalam menjawab tantangan pada era global. Seperti yang dikemukakan Cole, et al. (1994) bahwa universitas-universitas terkenal di dunia mengharuskan menyusun visi dan misi baru untuk menyongsong kehidupan era global yang semakin kompetitif.

Perubahan ini haruslah dilihat dari perspektif semangat menuju yang lebih baik, selaras dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas akademik. Hal ini juga terjadi pada Perguruan Tinggi luar negeri, karena subsidi pemerintah dalam bentuk block grant yang sangat kecil mengakibatkan Perguruan Tinggi yang ada di Amerika, Inggris, Kanada dan Australia telah melakukan terobosan pencarian dana dalam pengelolaan PT dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga PT telah berubah menjadi Kapitalisme Akademik (Academic Capitalism) (Slaughter dan Leslie, 1999).

Kesiapan Menuju Perguruan Tinggi Masa Depan

Dalam memasuki gelombang ketiga, secara makro Perguruan Tinggi (PT) akan menghadapi tantangan yang berat. Akibat percepatan arus perubahan sosial yang drastis, akhirnya secara sadar atau tidak, telah memaksa berbagai penjual jasa, termasuk perguruan tinggi untuk lebih adaptif terhadap

perubahan tersebut. Inisiatif untuk menata pendidikan tinggi dalam satu sistem nasional telah muncul sejak Tahun 1975. Sedangkan lahirnya UU Republik Indonesia (RI) tentang BHMN merupakan salah satu bentuk reformasi pendidikan dan kelanjutan dari pengembangan Pendidikan Tinggi. Untuk itu, keberadaan PT-BHMN harus menjadi inovator dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi. PT haruslah melakukan perubahan strategi, baik visi dan misinya yang tadinya berorientasi nasional menjadi strategi yang berorientasi global. Seperti yang dikemukakan Dahlan (2003), dengan perubahan status tersebut merupakan salah satu alternatif untuk menjawab meningkatnya persaingan global yang menuntut Perguruan Tinggi Masa Depan yang otonom.

Menurut PP No 61 Thn 1999 bahwa Perguruan Tinggi (PT) harus dikelola secara profesional seperti layaknya sebuah badan usaha. Namun, perubahan status tersebut hendaknya bukan menjadikan PT sebagai badan usaha yang hanya berorientasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan tidak dimanfaatkan secara serta merta membebani mahasiswa untuk menanggung biaya penyelenggaraan atau pengelolaan Perguruan Tinggi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang independen hendaknya tidak menjadikan perguruan tinggi tersebut sebagai sebuah badan usaha swastanisasi PTN, dan mengabaikan tanggung jawab sosialnya sebagai lembaga nirlaba penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tantangan utama yang dihadapi dalam suatu proses perubahan adalah dinamika perubahan itu sendiri yang memerlukan penyesuaian dan konsistensi untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan. Perbedaan antara sistem dan nilai-nilai lama dengan sistem dan nilai-nilai baru berpotensi menimbulkan konflik yang menuntut kepemimpinan dengan visi transformasi yang kuat untuk memandu arah perubahan yang akan dilakukan. Harus disadari bahwa dalam setiap melakukan suatu perubahan tidak terlepas dari berbagai kendala, baik dari Internal maupun Eksternal. Kendala yang dihadapi dari internal adalah adanya konflik kepentingan, sikap apriori atau curiga terhadap perubahan, pengaruh budaya dan sistem kerja lama, dan keterbatasan sumber daya. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi adalah belum adanya model yang baku yang tepat dan adanya kesalahan persepsi

“komersialisasi berlebihan” bila terjadi perubahan.

Untuk itu, dalam menuju Perguruan Tinggi Masa Depan diperlukan tekad yang kuat dari pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk berorientasi pada peningkatan mutu, memperbaiki proses, melakukan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan, memberdayakan semua unsur yang ada dengan peningkatan kemampuan agar meraih mutu yang diharapkan.

Manajemen Pendidikan Tinggi Menuju Perguruan Tinggi Masa Depan

Untuk mengantisipasi perubahan yang dinamis itu, maka perguruan tinggi masa depan harus menyiapkan manajemen yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan customer. Perguruan Tinggi (PT) dituntut memiliki misi, visi dan orientasi yang jelas, terbuka dan mempunyai tujuan jangka panjang yang dapat menciptakan produktivitas lulusan yang dapat berdaya saing ditingkat nasional, serta bersaing dengan lulusan dari pendidikan luar negeri. Reformasi manajemen merupakan salah satu tuntutan karena manajemen PT merupakan jantung dari dunia pendidikan tinggi yang akan memberikan atmosfer bagi pemenuhan kebutuhan pasar, serta mampu menciptakan lapangan kerja.

Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan PT sudah sangat mendesak, termasuk dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu/ kualitas. Bagi pengelola PT, sistem manajemen mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan yang terus menerus untuk memperkuat dan mengembangkan mutu. Di era Global, perubahan yang sangat cepat akan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia mengakibatkan terjadinya globalisasi pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya pergeseran paradigma pendidikan dari yang bersifat tradisional ke sistem pengelolaan industri. Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu alternatif yang dapat dilakukan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya bagi Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan maupun pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Seperti yang disampaikan Tilaar (2000) otonomi kelembagaan pendidikan tinggi tidak hanya otonomi dalam bentuk kebebasan

akademik dan mimbar akademik, tetapi juga otonomi lembaga dalam bidang manajemen, penyusunan program, dan budget, sehingga pendidikan tinggi sebagai lembaga akan kreatif dan menjadi pelopor perubahan dalam masyarakat maupun dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk itu, konsep PT perlu menerapkan manajemen modern dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat menambah pemasukan dana untuk operasionalisasi PT. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki demi kepentingan kemajuan perguruan tinggi. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara transformasi PTN menjadi PT-BHMN. Namun, perubahan status ini akan menjadi sia-sia bila hanya digunakan sebagai suatu ‘label’ sebuah Perguruan Tinggi tanpa perbaikan pada kinerjanya. Otonomi dalam sistem pengelolaan PT yang ditawarkan melalui status BHMN bukanlah suatu kondisi yang tercipta seketika, melainkan suatu kondisi yang harus dibangun melalui pengembangan kemampuan dalam pengelolaan suatu organisasi pendidikan tinggi secara mandiri, baik dalam penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan dan peningkatan sumber daya yang dimilikinya. Untuk itu, diperlukan motivasi yang sangat kuat, visi yang jelas dan konsisten dalam melakukan perubahan menuju sasaran yang telah ditetapkan. Seperti yang dikemukakan Arief Rahman (2004), keberhasilan pengelolaan suatu perguruan tinggi tidak lepas dari kualitas manusianya yang akan menjalankan visinya, sistem yang dibangun harus benar-benar bisa melaksanakan visinya dengan baik, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan diharapkan dapat membangun PT Masa Depan yang sehat dan berkualitas. Harus disadari bahwa “Pendidikan bukan merupakan lahan tempat mencari keuntungan”.

Untuk mewujudkan Perguruan Tinggi Masa Depan sebagai world class university maka PT haruslah melakukan pola manajemen yang bertahap dan berkelanjutan yang dalam kebijakannya operasionalnya dengan, a) Melakukan kegiatan yang berorientasi kepada kebutuhan; b) Melakukan pendekatan perubahan 3M (Mudah, Murah dan Menghasilkan) dan 4B (Bertahap, Berjenjang, Bersepakat dan Berkelanjutan); c) Performance-based and fairness, yaitu melakukan perbaikan kinerja dengan alokasi

sumber daya berdasarkan kinerja dan keadilan termasuk insentif untuk kesejahteraan pegawai; d) *Completing the Loop*, yaitu perencanaan yang dilakukan mempertimbangkan perbaikan dan pengembangan yang diikuti dengan implementasi, operasi, analisis dan evaluasi; e) *Resource leveraging and Institutionalized*, yaitu dalam melakukan kemitraan dengan mendayagunakan kompetensi yang dimiliki secara maksimal (*resource leveraging*) dan melembaga (*institutionalized*) guna proses penciptaan nilai (Kardiman, 2003).

Konsep ini tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika. Untuk itu, harus dilakukan sosialisasi secara komprehensif agar keterlibatan semua penyelenggara pendidikan dapat berfungsi secara optimal karena kemajuan PT sangat ditentukan oleh kerja sama dari seluruh civitas akademiknya. Untuk mendapatkan akuntabilitas yang baik, maka perlu adanya *open management* baik dalam pengelolaan keuangan, pengambilan kebijakan dan penentuan unsur-unsur pengelola (seperti Dewan Audit, Senat Akademik, Dosen, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Teknisi, Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administrasi dan Unsur Penunjang) hendaknya dilakukan berdasarkan pemilihan bukan berdasarkan penghunjukan untuk mencegah adanya unsur *Nepotisme*.

Manajemen pendidikan yang dilakukan mengacu pada tiga model, yakni model: 1) *Production Oriented*, 2) *Market Oriented* dan 3) *Society Oriented Model* (Mujtahid, 2002). Dalam hal ini PT harus mampu menawarkan jasanya dengan penuh keyakinan bahwa PT tersebut mempunyai kapabilitas intelektual, sistem nilai yang cukup mapan, maupun pengalaman, bagi pembeli jasa. Jadi, sesuatu yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya inovasi terhadap *Production Oriented* harus dilakukan secara terus menerus dengan melirik pada pasar dan lapangan kerja yang hendak menjadi sasaran *Production Oriented* tersebut. Selain itu, perguruan tinggi harus sesuai dengan harapan masyarakat, mengingat iklim kompetisi semakin dituntut di era globalisasi. Perguruan Tinggi Masa Depan haruslah memfokuskan manajerial organisasinya pada kepuasan pelanggan, yang terdiri dari masyarakat pengguna (*user*), masyarakat intelektual, dan masyarakat peminat pendidikan (*calon*

mahasiswa). Oleh sebab itu, keluwesan dan keleluasaan sistem kerja, budaya dan struktur perguruan tinggi perlu dievaluasi dan diperbaiki. Sebagai konsekwensinya perlu ada koreksi terhadap dimensi aturan-aturan yang mengikat perguruan tinggi, kecuali menyangkut standar mutu minimal yang perlu dirumuskan secara bersama-sama. Dengan demikian, PT haruslah mampu menerapkan pola manajemen adaptif terhadap perubahan, manajemen partisipatif sesuai dengan budaya lokal dan desentralisasi, dan membentuk organisasi yang flat tanpa hirarkhi yang berlebihan serta manajemen mengambil peranan moral dan etika dalam mengelola PT. Langkah-langkah yang harus dilakukan PT adalah melakukan proses internalisasi yang dikemas dalam pembentukan budaya organisasi yang sesuai dengan misi, visi dan tujuan jangka panjang PT tersebut. Menurut Schein (1992) bahwa budaya organisasi adalah pola keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami dan dijiwai oleh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi setidaknya dapat membentuk karakteristik yang dapat membedakan satu PT dengan PT yang lain. Jika sebuah PT menginginkan hasil didik yang berwawasan pencipta kerja, maka budaya organisasi mendorong peserta didik yang inovatif, visioner dan mau peduli terhadap resiko dan punya *self confidence* yang tinggi yang harus diciptakan.

Model Pelayanan Perguruan Tinggi Masa Depan

Perguruan Tinggi telah mentasdirikan diri sebagai usaha jasa pendidikan. Sebagai usaha jasa, pendidikan tinggi mempunyai kelompok pelanggan yang harus dilayani dengan pelayanan jasa yang bermutu. Seperti yang dikemukakan Tampubolon (2001) bahwa PT pada dasarnya adalah 'industri jasa', seperti rumah sakit, hotel dan biro perjalanan yang berusaha memberikan pelayanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk itu, sebagai industri jasa PT harus dapat memberikan model pelayanan yang bermutu kepada pelanggannya agar lulusan yang dihasilkan bermutu sehingga mampu menghadapi persaingan pada era global. Era Global merupakan era persaingan mutu atau kualitas sehingga perguruan tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mutu, baik dalam kegiatan jasa pendidikan maupun

pengembangan Sumber Daya Manusia agar memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan pada era global.

Model Total Quality Management yang mengedepankan aspek kualitas dan aspek pelayanan perlu diintrodusir bagi setiap Perguruan Tinggi melalui upaya optimasi kualitas manajemen proses dan sumber daya manusia serta dana. Perhatian terhadap mutu harus mencakup dalam tiga wilayah utama (three main areas) pendidikan, yaitu: pengajaran (teaching), penelitian (research), dan pendidikan berkelanjutan (continuing education). Seperti yang dikemukakan Creech (1996) bahwa untuk menghasilkan produk Perguruan Tinggi yang bermutu haruslah memenuhi prinsip-prinsip Lima Pilar Total Quality Management, yaitu (a) Organisasi sebagai pusat pengembangan mutu, (b) Produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen, (c) Proses diarahkan kepada produk yang bermutu sebagaimana yang diharapkan, (d) Adanya kepemimpinan yang kuat, dan (e) Adanya komitmen dari seluruh Civitas Akademika dan seluruh Stakeholders untuk mewujudkan visi dan misi Perguruan Tinggi. Selain itu, Tilaar (2003) menambahkan bahwa kerjasama intra dan inter Universitas PTN dan PTS dan seluruh lembaga PT yang saling menguntungkan perlu dijalankan, tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, pimpinan Perguruan Tinggi sebagai penanggung jawab utama pada PT berdasarkan PP No. 60 Thn 1999, pasal 29 dituntut melakukan model pelayanan demi peningkatan mutu lulusan dengan membekali mahasiswa memiliki jiwa kewirausahaan, pembukaan program diarahkan pada kebutuhan masyarakat, menjalin kerja sama antar perguruan tinggi, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tidak mampu yang memiliki keunggulan prestasi serta mendorong manajemen internal yang lebih kondusif.

Perguruan Tinggi sebagai wahana kumpulan tenaga ahli diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan kepada pembangunan. Untuk itu, Perguruan Tinggi Masa Depan haruslah selalu melakukan pembaharuan, baik kurikulum maupun model pembelajaran dan pengajarannya agar relevansi pendidikan dengan pembangunan atau kebutuhan masyarakat memiliki keterkaitan dan kesepadanan (link and match). Menurut

UNESCO pada "The International Commission on Education for the Twenty-First Century" bahwa model pembelajaran yang bermutu mengacu pada empat pilar proses belajar yaitu Learning to know, Learning to do, Learning to be dan Learning to live together (Learning to live with others).

Learning to know, pada hakikat sejalan dengan penerapan paradigma ilmu pengetahuan, yaitu proses pembelajaran dilakukan agar peserta didik dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Melalui proses pembelajaran semacam ini menunjukkan bahwa pendidikan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi diharapkan akan melahirkan generasi yang dipercaya mampu mengelola dan mendayagunakan alam untuk kemajuan taraf hidupnya. Bila semua dilakukan melalui pendekatan ini, pendidikan tidak akan bermakna karena bahan yang dapat dipelajari akan sangat terbatas. Untuk itu, dalam proses pembelajaran perlu mempelajari hal-hal lainnya (transfer of learning). Learning to do, yaitu proses pembelajaran dilakukan agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna melalui suatu proses pembelajaran "active learning". Dalam proses ini peserta didik diharapkan lebih aktif dengan cara memberi penugasan secara individu atau kelompok atau membuat ringkasan terhadap buku atau materi pelajaran yang akan dipelajari. Pada pembelajaran ini memungkinkan peserta didik lebih aktif, baik secara intelektual, motorik maupun emosional. Learning to be, yaitu model pembelajaran ini dirancang terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. Rasa kemandirian akan tumbuh dari sikap percaya diri. Atas dasar tersebut, maka proses pembelajaran dilakukan peserta didik mengenal dirinya dengan penuh kebahagiaan. Ini sukar diperoleh pada proses pembelajaran tradisional yang lebih menekankan pada hafalan. Pendekatan melalui penerapan menemukan dan menyelidiki memungkinkan peserta didik menemukan kebahagiaan dalam belajar (joy of learning). Bila ia telah mengenal dirinya maka akan terbentuk kemandirian, sehingga mendorong anak tidak tergantung kepada orang lain. Ini merupakan bentuk belajar yang menunjang terbentuknya pribadi yang mandiri. Learning to live

together, model proses pembelajaran ini memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antara manusia secara intensif dan terus menerus. Dengan demikian, perbedaan antar ras, suku, agama, keyakinan politik dan kepentingan ekonomi yang masih sering terjadi dapat dihindari. Untuk itu, proses belajar ini perlu diberikan pendidikan nilai kemanusiaan, moral dan agama yang melandasi hubungan antar manusia dapat diintensifkan.

Penerapan keempat pilar proses belajar tersebut sangat relevan dilakukan pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi untuk terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan mampu bersaing pada era global.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Perguruan Tinggi sebagai suatu lembaga mengemban tanggung jawab yang harus mampu merespons tantangan jaman (external adaptation) untuk memenuhi amanah publik dan sekaligus memajukan komunitas akademik untuk mencapai academic excellence. Untuk itu, perlu diciptakan iklim akademik yang bersih, teratur baik dari segi lingkungan fisik (eksternal dan internal) maupun segi manajemen birokrasi. Adanya perubahan PTN yang berubah menjadi BHMN haruslah dipandang sebagai peluang yang sangat penting untuk mengawali perubahan fundamental untuk mewujudkan Perguruan Tinggi Masa Depan sebagai world class university yang berorientasi pada mutu sehingga kualitas lulusannya diharapkan mampu menghadapi tantangan pada era global maupun bersaing dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri
2. Dalam melakukan proses menuju Perguruan Tinggi Masa Depan sebagai world class university tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan. Namun, upaya yang harus dilakukan adalah dengan menghilangkan atau mengurangi inerti terhadap perubahan yang bersumber dari kepentingan individu atau kelompok, sikap apriori atau curiga terhadap perubahan dan pengaruh budaya dan sistem kerja lama pada sikap kerja individu atau kelompok.

Untuk itu, diperlukan kepemimpinan dengan visi transformasi yang kuat untuk memandu perubahan agar mampu menyelaraskan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin akuntabilitas, maka perlu adanya transparansi yang sifatnya terbuka untuk setiap kegiatan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi yang mandiri.

3. Dalam menuju Perguruan Tinggi Masa Depan hendaknya dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan secara sistematis kualitas produk dan proses pendidikan tinggi agar mampu berperan secara nyata demi kemajuan bangsa dan Ilmu Pengetahuan secara Global sehingga dituntut adanya kerja sama dari seluruh kalangan civitas akademika maupun pemerintah daerah sehingga sangat diharapkan dukungannya untuk membangun infrastruktur institusional bagi Perguruan Tinggi.

Daftar Pustaka

- Arief Rahman. 2003. "Badan Hukum Pendidikan Jangan Jadi Alat Mencari Keuntungan". Webmaster, 12 Maret 2004.
- Cole, Jonathan R. et al. (Editors). 1994. *The Research University in A Time of Discontent*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Creech, Bill. 1996. *Lima Pilar TQM*. Terjemahan. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Dahlan, Djawad. 2003. "Perpektif Badan Hukum Pendidikan". Media Indonesia. 29 September 2003.
- Efendi, Sofyan. 2001. "Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi: Resep Profesor Nicholas Barr". Makalah. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Jacques Delors. et al. 1998. *Learning The Treasure Within*. Paris: UNESCO
- Kardiman, Kusmayanto. 2003. "ITB: Menapak Menuju Keberhasilan Transformasi". Policy Paper. Disampaikan sebagai Laporan Penyelenggara-an dan Pengembangan ITB Tahun 2002. Bandung: ITB.

- Mujtahid. 2002. "Menata Kembali Manajemen Pendidikan Tinggi". Makalah. Malang: Universitas Muhamaddyah Malang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi. Dirjen Dikti.
- Purba, Sukarman. 2005. "Pendidikan dalam Sistem Desentralisasi menghadapi Kompetisi Global: Suatu Tinjauan Pendidikan Berorientasi Masa Depan". Makalah. Jakarta: Pasca Sarajana UNJ
- Schein, Edgar H. 1992. *Organizational Culture And Leadership*. Second Edition, San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
- Slaughter, Sheila dan Leslei, Larry L. 1999. *Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University*. London: The Johns Hopkins University Press
- Tampubolon, Daulat P. 2001. *Perguruan Tinggi Bermutu*. Jakarta: PT. Gramedia
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Megelang: Indonesiatara.